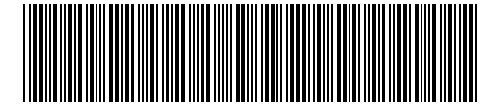




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.408720/2020**



DS:2903-8330-7780-1252

Revisi ke 02

Tanggal : 19 Februari 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
- Sebesar : Rp. 23.404.746.000 (DUA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM
013.01.01.1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Rp.	Jumlah Uang
	23.404.746.000	
	Rp.	23.404.746.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 23.404.746.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 23.404.746.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : CENO HERSUSETIOKARTIKO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			23.404.746.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			23.404.746.000
2 Program	013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM			23.404.746.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	7,1	indeks	
	02	Nilai Reformasi Birokrasi	85	Nilai RB	
	03	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85	Nilai LAKIP	
Output Program	01	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM			
Indikator Output Program	01	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan HAM	7,1	indeks	
Kegiatan	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			23.404.746.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.			
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.			
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel			
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan			
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.			
	06	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar			
	07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan			
	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.			
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.			
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel			
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan			
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.			
	06	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar			
	07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : CENO HERSUSETIOKARTIKO

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.			
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.			
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel			
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan			
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel.			
	06	Jumlah Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar			
	07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan			
Output Kegiatan	1558.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		2.851.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	1	unit	
	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	1	unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1000	m2	
Output Kegiatan	1558.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		2.212.007.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	33	Dokumen	
	02	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	33	Layanan	
	03	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	33	Layanan	
	04	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	33	Layanan	
	05	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	33	Layanan	
	06	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat	33	Layanan	
Output Kegiatan	1558.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		18.341.739.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	

Jakarta, 12 November 2019
Sekretaris Jenderal

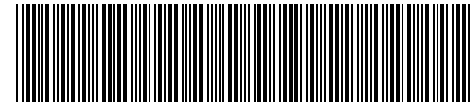
ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020

I B. SUMBER DANA



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	23.404.746.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	23.404.746.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	12.837.975	7.715.771	2.851.000	-	-	23.404.746		
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	12.837.975	7.715.771	2.851.000	-	-	23.404.746		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	12.837.975	7.715.771	2.851.000	-	-	23.404.746		
1558.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	2.851.000	-	-	2.851.000	01 . 55	
01	RM	-	-	2.851.000	-	-	2.851.000	139	
1558.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	2.212.007	-	-	-	2.212.007	01 . 55	
01	RM	-	2.212.007	-	-	-	2.212.007	139	
1558.994	Layanan Perkantoran	12.837.975	5.503.764	-	-	-	18.341.739	01 . 55	
01	RM	12.837.975	5.503.764	-	-	-	18.341.739	139	
JUMLAH		12.837.975	7.715.771	2.851.000	-	-	23.404.746		

Jakarta, 12 November 2019
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

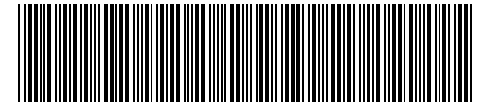
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.376.245	1.950.924	2.124.814	1.966.773	2.336.720	2.787.895	2.020.706	1.869.796	2.747.796	1.427.120	1.396.546	1.399.410	23.404.746
		51 BELANJA PEGAWAI	916.998	916.998	916.998	916.998	1.833.996	1.833.996	916.998	916.998	916.998	916.998	916.998	916.998	12.837.975
		52 BELANJA BARANG	459.247	1.033.926	1.127.816	1.049.775	502.723	480.648	630.458	479.548	479.548	510.122	479.548	482.412	7.715.771
		53 BELANJA MODAL	0	0	80.000	0	0	473.250	473.250	473.250	1.351.250	0	0	0	2.851.000
	013.01.01.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.376.245	1.950.924	2.124.814	1.966.773	2.336.720	2.787.895	2.020.706	1.869.796	2.747.796	1.427.120	1.396.546	1.399.410	23.404.746
		51 BELANJA PEGAWAI	916.998	916.998	916.998	916.998	1.833.996	1.833.996	916.998	916.998	916.998	916.998	916.998	916.998	12.837.975
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	459.247	1.033.926	1.127.816	1.049.775	502.723	480.648	630.458	479.548	479.548	510.122	479.548	482.412	7.715.771
		53 BELANJA MODAL	0	0	80.000	0	0	473.250	473.250	473.250	1.351.250	0	0	0	2.851.000

Jakarta, 12 November 2019
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
IV A. B L O K I R**



DS:2903-8330-7780-1252

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408720] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.01.2.408720/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:2903-8330-7780-1252

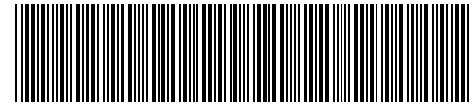
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408720] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA		
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
1558.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	5.702.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Lift 1 unit	Rp.	2.851.000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Biaya konstruksi 408 M2	Rp.	2.851.000

Jakarta, 12 November 2019
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408721/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (408721) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 2.183.000.000 (DUA MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	Rp.	2.183.000.000
013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	2.183.000.000

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.183.000.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 2.183.000.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1416-4908-7603-0892

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408721) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			2.183.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			2.183.000.000
2 Program	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum			2.183.000.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum			
	02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah penyelesaian Permohonan Layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	7.133.611	Dokumen	
	01	Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan permintaan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti	14	Kasus	
Output Program	01	Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang diselesaikan tepat waktu dan berkepastian Hukum			
Indikator Output Program	01	Jumlah Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian Hukum	7.133.611	Dokumen	
Kegiatan	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.183.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU			
	02	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
Output Kegiatan	5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	3 Laporan		1.470.942.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Administasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	99	Laporan	
Output Kegiatan	5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	3 Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan		712.058.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	99	Laporan	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020

I B. SUMBER DANA



DS:1416-4908-7603-0892

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408721) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	2.183.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.183.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1416-4908-7603-0892

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408721) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

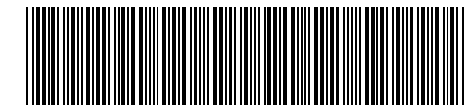
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408721	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	2.183.000	-	-	-	2.183.000		
013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	-	2.183.000	-	-	-	2.183.000		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.183.000	-	-	-	2.183.000		
5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	-	1.470.942	-	-	-	1.470.942	01 . 00	
04	PNBP	-	1.470.942	-	-	-	1.470.942	139	
5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	-	712.058	-	-	-	712.058	01 . 00	
04	PNBP	-	712.058	-	-	-	712.058	139	
JUMLAH		-	2.183.000	-	-	-	2.183.000		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1416-4908-7603-0892

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408721) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

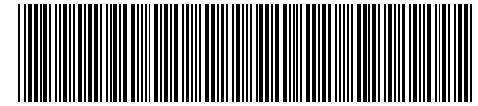
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408721	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	263.102	68.759	625.573	82.528	84.203	199.075	201.125	201.496	213.234	113.014	130.891	2.183.000
		52 BELANJA BARANG	0	263.102	68.759	625.573	82.528	84.203	199.075	201.125	201.496	213.234	113.014	130.891	2.183.000
	013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	263.102	68.759	625.573	82.528	84.203	199.075	201.125	201.496	213.234	113.014	130.891	2.183.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	263.102	68.759	625.573	82.528	84.203	199.075	201.125	201.496	213.234	113.014	130.891	2.183.000

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020
IV A. B L O K I R**



DS:1416-4908-7603-0892

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408721] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

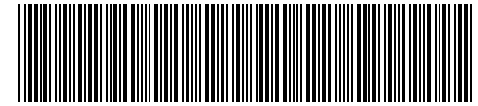
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408721/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:1416-4908-7603-0892

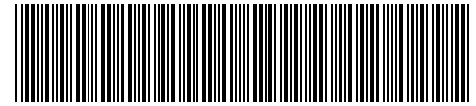
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408721] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408722/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | DITJEN PEMASYARAKATAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408722) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 399.276.000 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
013.05.08.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	399.276.000
Rp.	399.276.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	399.276.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 399.276.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO, Bc.IP., S.H., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI, S.H., M.H

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			399.276.000
Sub Fungsi	03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN			399.276.000
2 Program	013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan			399.276.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
	02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri			
	03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90	Persen	
	01	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	15,2	Persen	
	01	Menurunnya Persentase Residivis	9,8	Persen	
Output Program	01	Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana			
Indikator Output Program	01	Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar	90	Persen	
	02	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar	90	Persen	
	03	Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar	90	Persen	
	04	Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar	90	Persen	
	05	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90	Persen	
	06	Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar	90	Persen	
	07	Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar	90	Persen	
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			399.276.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah			
	02	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
	03	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
	04	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
	05	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
	06	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	07	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar			
	08	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	09	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	10	Layanan Perkantoran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO, Bc.IP., S.H., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI, S.H., M.H

Halaman : IA.2

Sasaran Kegiatan	11	Meningkatnya Kapasitas Hunian
	12	Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker
Indikator Kinerja Kegiatan	05	Jumlah Kendaraan Bermotor
	01	Persentase UPT Masyarakat di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
	04	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
	04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar
	01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar
	06	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO, Bc.IP., S.H., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI, S.H., M.H

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	07	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
	08	Jumlah Gedung/Bangunan			
	01	Jumlah Layanan Perkantoran			
	01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)			
	02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)			
	03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)			
	04	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan			
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu			
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar			
	03	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi			
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
Output Kegiatan	5252.003	Pembinaan UPT Pemasyarakatan	18 UPT		399.276.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90	%	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020

I B. SUMBER DANA



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : I B. 1

			Pagu				Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	399.276.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	399.276.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408722	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	399.276	-	-	-	399.276		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	-	399.276	-	-	-	399.276		
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	-	399.276	-	-	-	399.276		
5252.003	Pembinaan UPT Masyarakat	-	399.276	-	-	-	399.276	01 . 55	
01	RM	-	399.276	-	-	-	399.276	139	
JUMLAH		-	399.276	-	-	-	399.276		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Masyarakat

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408722) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

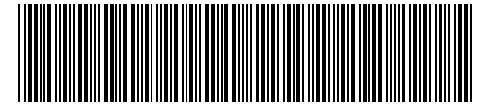
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408722	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	13.430	26.216	33.205	60.305	14.976	28.559	70.180	28.536	30.393	51.510	26.990	14.976	399.276
		52 BELANJA BARANG	13.430	26.216	33.205	60.305	14.976	28.559	70.180	28.536	30.393	51.510	26.990	14.976	399.276
	013.05.08.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	13.430	26.216	33.205	60.305	14.976	28.559	70.180	28.536	30.393	51.510	26.990	14.976	399.276
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	13.430	26.216	33.205	60.305	14.976	28.559	70.180	28.536	30.393	51.510	26.990	14.976	399.276

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
IV A. B L O K I R**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408722] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408722/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:2006-1206-0811-9398

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408722] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

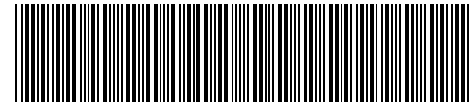
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Sri Puguh Budi Utami
NIP 196207021987032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.408723/2020**



DS:8350-6263-0000-8804

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DITJEN IMIGRASI |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (408723) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 1.416.378.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp.	1.416.378.000
013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	1.416.378.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.416.378.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 1.416.378.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8350-6263-0000-8804

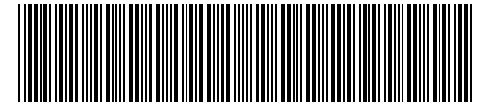
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408723) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : Bambang Sumardiono
Bendahara Pengeluaran : Dian Erviana
Pejabat Penanda Tangan SPM : Nuni Suryani

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			1.416.378.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			1.416.378.000
2 Program	013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			1.416.378.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
	02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	Indeks	
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	Persen	
Output Program	01	Pelayanan Keimigrasian			
Indikator Output Program	01	Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	38400200	Layanan	
Kegiatan	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.416.378.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
	02	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian			
	03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian			
	04	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi			
	05	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker			
	06	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	07	Terselenggaranya Layanan Perkantoran			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian			
	01	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian			
	01	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian			
	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan			
	01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker			
	01	Jumlah Layanan Internal Overhead			
	01	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5254.016	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	16 Kegiatan		919.376.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	792	Kegiatan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408723) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : Bambang Sumardiono
Bendahara Pengeluaran : Dian Erviana
Pejabat Penanda Tangan SPM : Nuni Suryani

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	21 LHK		497.002.000
Indikator Output Kegiatan	01	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	2,5	Indeks	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

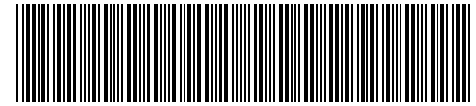
ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020

I B. SUMBER DANA



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408723) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

		Rp.	1.416.378.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2020					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni			0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB			1.416.378.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri			0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung			0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS			0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408723) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408723	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	1.416.378	-	-	-	1.416.378		
013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	1.416.378	-	-	-	1.416.378		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.416.378	-	-	-	1.416.378		
5254.016	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	-	919.376	-	-	-	919.376	01 . 00	
04	PNBP	-	919.376	-	-	-	919.376	139	
5254.017	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	497.002	-	-	-	497.002	01 . 55	
04	PNBP	-	497.002	-	-	-	497.002	139	
JUMLAH		-	1.416.378	-	-	-	1.416.378		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408723) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

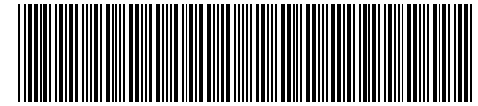
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408723	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	31.321	67.312	118.816	229.602	112.695	103.305	136.575	137.949	243.734	113.356	91.640	30.073	1.416.378
		52 BELANJA BARANG	31.321	67.312	118.816	229.602	112.695	103.305	136.575	137.949	243.734	113.356	91.640	30.073	1.416.378
	013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	31.321	67.312	118.816	229.602	112.695	103.305	136.575	137.949	243.734	113.356	91.640	30.073	1.416.378
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	31.321	67.312	118.816	229.602	112.695	103.305	136.575	137.949	243.734	113.356	91.640	30.073	1.416.378

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
IV A. B L O K I R**



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408723] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

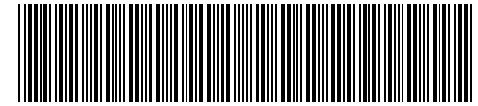
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.06.2.408723/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:8350-6263-0000-8804

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408723] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

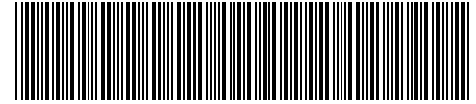
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.408724/2020**



DS:9900-0432-2983-6319

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (07) | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408724) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 780.915.000 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
013.07.09.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	780.915.000
Rp.	780.915.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 780.915.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 780.915.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408724) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			780.915.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			780.915.000
2 Program	013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			780.915.000
Sasaran Program	01	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia			
Indikator Kinerja Program	01	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	2	Persentase	
	02	Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi	5	Persentase	
	03	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	5	Persentase	
Output Program	01	Layanan Kekayaan Intelektual			
Indikator Output Program	01	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	99	%	
	02	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	80	%	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.3	Indeks	
Kegiatan	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			780.915.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM			
	02	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah			
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah			
Output Kegiatan	5253.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	100	Jumlah Permohonan	693.012.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah	4389	Permohonan	
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	990	Stakeholder	
Output Kegiatan	5253.002	Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah	3	Lokus	87.903.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	66	Lokus	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.

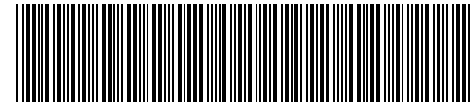
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020

I B. SUMBER DANA



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408724) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	780.915.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	780.915.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408724) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

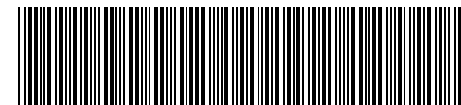
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408724	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	780.915	-	-	-	780.915		
013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	-	780.915	-	-	-	780.915		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	780.915	-	-	-	780.915		
5253.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	693.012	-	-	-	693.012	01 . 55	
04	PNBP	-	693.012	-	-	-	693.012	139	
5253.002	Penegakan Hukum Bidang KI di Wilayah	-	87.903	-	-	-	87.903	01 . 55	
04	PNBP	-	87.903	-	-	-	87.903	139	
JUMLAH		-	780.915	-	-	-	780.915		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408724) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

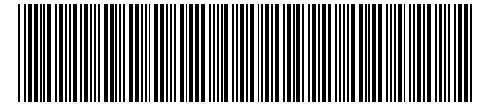
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408724	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	4.600	88.010	238.345	10.970	131.745	85.183	68.550	78.950	68.447	2.600	3.515	780.915
		52 BELANJA BARANG	0	4.600	88.010	238.345	10.970	131.745	85.183	68.550	78.950	68.447	2.600	3.515	780.915
	013.07.09.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	4.600	88.010	238.345	10.970	131.745	85.183	68.550	78.950	68.447	2.600	3.515	780.915
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	4.600	88.010	238.345	10.970	131.745	85.183	68.550	78.950	68.447	2.600	3.515	780.915

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020
IV A. B L O K I R**



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408724] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

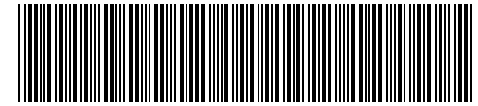
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.07.2.408724/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:9900-0432-2983-6319

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408724] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

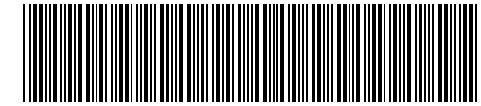
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408725/2020**



DS:2611-0685-6900-2890

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (408725) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
- Sebesar : Rp. 118.000.000 (SERATUS DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 118.000.000
Rp. 118.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	118.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 118.000.000

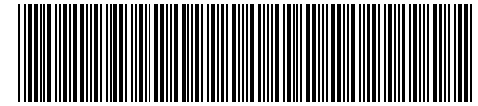
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408725) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : Bambang Sumardiono
Bendahara Pengeluaran : Dian Erviana
Pejabat Penanda Tangan SPM : Nuni Suryani

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			118.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			118.000.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			118.000.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			118.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	4 Raperda		99.281.000
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	6 Orang		18.719.000

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

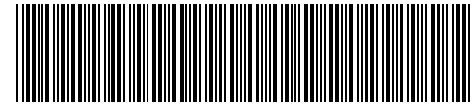
ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020

I B. SUMBER DANA



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408725) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	118.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	118.000.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408725) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408725	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	118.000	-	-	-	118.000		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	118.000	-	-	-	118.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	118.000	-	-	-	118.000		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	99.281	-	-	-	99.281	01 . 55	
01	RM	-	99.281	-	-	-	99.281	139	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	18.719	-	-	-	18.719	01 . 55	
01	RM	-	18.719	-	-	-	18.719	139	
JUMLAH		-	118.000	-	-	-	118.000		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408725) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

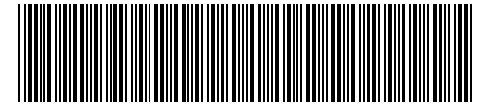
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408725	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	11.714	42.179	30.712	3.135	9.858	5.742	6.742	5.607	2.311	0	118.000
		52 BELANJA BARANG	0	0	11.714	42.179	30.712	3.135	9.858	5.742	6.742	5.607	2.311	0	118.000
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	0	0	11.714	42.179	30.712	3.135	9.858	5.742	6.742	5.607	2.311	0	118.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	11.714	42.179	30.712	3.135	9.858	5.742	6.742	5.607	2.311	0	118.000

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020
IV A. B L O K I R**



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408725] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

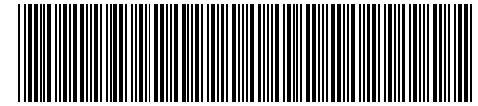
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408725/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:2611-0685-6900-2890

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408725] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

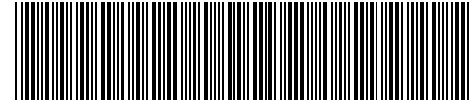
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408726/2020**



DS:2702-0354-0132-0185

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
- Sebesar : Rp. 226.410.000 (DUA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 226.410.000
Rp. 226.410.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	226.410.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 226.410.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2702-0354-0132-0185

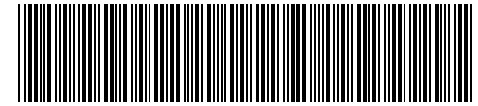
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI

Halaman : IA.1

1	Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					226.410.000
	Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM					226.410.000
2	Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM					226.410.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM					
	Indikator Kinerja Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70		Persen		
		02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15		Persen		
		03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10		Persen		
		04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50		Persen		
		05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75		Persen		
		06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1		Rekomendasi		
		07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60		Persen		
	Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM					
	Indikator Output Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70		Persen		
		02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15		Persen		
		03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10		Persen		
		04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50		Persen		
		05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75		Persen		
		06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1		Rekomendasi		
		07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60		Persen		
	Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah					226.410.000
	Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					
		02	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					
		02	jumlah kab/kota peduli HAM					
		03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM					
		01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 rekomendasi	77.884.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	99 rekomendasi	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	8 Instansi Pemerintah	148.526.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020

I B. SUMBER DANA



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	226.410.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	226.410.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408726	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	226.410	-	-	-	226.410		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	226.410	-	-	-	226.410		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	226.410	-	-	-	226.410		
5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	77.884	-	-	-	77.884	01 . 55	
01	RM	-	77.884	-	-	-	77.884	139	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	148.526	-	-	-	148.526	01 . 55	
01	RM	-	148.526	-	-	-	148.526	139	
JUMLAH		-	226.410	-	-	-	226.410		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408726) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408726	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.220	17.356	19.360	27.820	29.322	7.260	29.900	25.028	19.612	43.266	4.266	0	226.410
		52 BELANJA BARANG	3.220	17.356	19.360	27.820	29.322	7.260	29.900	25.028	19.612	43.266	4.266	0	226.410
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	3.220	17.356	19.360	27.820	29.322	7.260	29.900	25.028	19.612	43.266	4.266	0	226.410
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.220	17.356	19.360	27.820	29.322	7.260	29.900	25.028	19.612	43.266	4.266	0	226.410

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
IV A. B L O K I R**



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408726] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408726/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:2702-0354-0132-0185

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408726] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

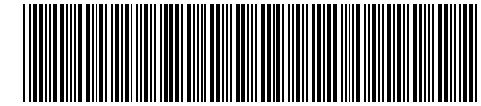
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.408727/2020**



DS:6681-7500-0103-2400

Revisi ke 01

Tanggal : 27 Februari 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408727) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 5.538.953.000 (LIMA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	5.538.953.000
Rp.	5.538.953.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 5.538.953.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 5.538.953.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : CENO HERSUSETIOKARTIKO

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			5.538.953.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			5.538.953.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			5.538.953.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Sadar H	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Sadar Hu	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			5.538.953.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : CENO HERSUSETIOKARTIKO

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	527 Orang		4.216.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00	Orang	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	78 Kegiatan		832.260.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		111.867.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		172.500.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		103.163.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : CENO HERSUSETIOKARTIKO

Halaman : IA.3

Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	103.163.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33 Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

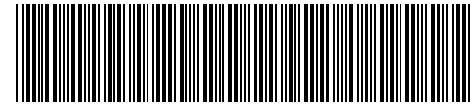
ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020

I B. SUMBER DANA



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	5.538.953.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	5.538.953.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



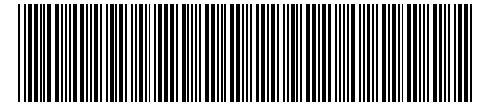
DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408727	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	5.534.453	4.500	-	-	5.538.953		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	5.534.453	4.500	-	-	5.538.953		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	5.534.453	4.500	-	-	5.538.953		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	4.216.000	-	-	-	4.216.000	01 . 55	
01	RM	-	4.216.000	-	-	-	4.216.000	139	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	832.260	-	-	-	832.260	01 . 55	
01	RM	-	832.260	-	-	-	832.260	139	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	111.867	-	-	-	111.867	01 . 55	
01	RM	-	111.867	-	-	-	111.867	139	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	172.500	-	-	-	172.500	01 . 55	
01	RM	-	172.500	-	-	-	172.500	139	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	103.163	-	-	-	103.163	01 . 55	
01	RM	-	103.163	-	-	-	103.163	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

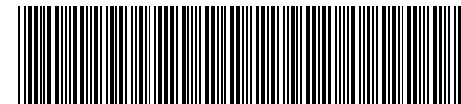
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	98.663	4.500	-	-	103.163	01 . 55	
01	RM	-	98.663	4.500	-	-	103.163	139	
JUMLAH		-	5.534.453	4.500	-	-	5.538.953		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408727) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

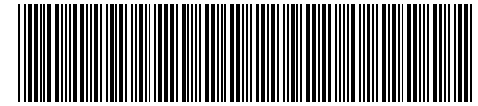
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408727	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	259.540	327.687	320.420	369.756	308.680	686.030	680.420	775.870	814.840	995.710	5.538.953
		52 BELANJA BARANG	0	0	258.909	327.552	320.420	367.563	308.680	686.030	680.420	774.329	814.840	995.710	5.534.453
		53 BELANJA MODAL	0	0	631	135	0	2.193	0	0	0	1.541	0	0	4.500
013.10.12.5256		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	259.540	327.687	320.420	369.756	308.680	686.030	680.420	775.870	814.840	995.710	5.538.953
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	258.909	327.552	320.420	367.563	308.680	686.030	680.420	774.329	814.840	995.710	5.534.453
		53 BELANJA MODAL	0	0	631	135	0	2.193	0	0	0	1.541	0	0	4.500

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
IV A. B L O K I R**



DS:6681-7500-0103-2400

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408727] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

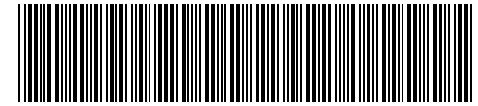
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.408727/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:6681-7500-0103-2400

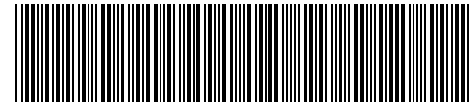
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408727] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.408728/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (11) | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (408728) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA |
| Sebesar | : Rp. | 55.094.000 (LIMA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
013.11.04.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	55.094.000
Rp.	55.094.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 55.094.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 55.094.000 |
|-------------------|-----------|------------|

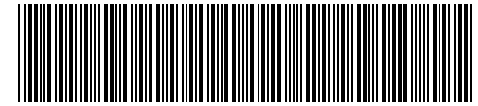
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408728) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : BAMBANG SUMARDIONO
Bendahara Pengeluaran : DIAN ERVIANA
Pejabat Penanda Tangan SPM : NUNI SURYANI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			55.094.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			55.094.000
2 Program	013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM			55.094.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	60	%	
Output Program	01	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
Indikator Output Program	01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	60	%	
Kegiatan	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			55.094.000
Sasaran Kegiatan	01	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
	02	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
	01	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Output Kegiatan	5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	Layanan	55.094.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60	%	
	02	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	Buku	

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

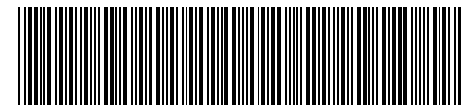
ttd.
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M
NIP 196611191986031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020

I B. SUMBER DANA



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (408728) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : I B. 1

						Pagu			Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	55.094.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	55.094.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408728) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408728	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	-	55.094	-	-	-	55.094	01 . 55 139	
013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	-	55.094	-	-	-	55.094		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	55.094	-	-	-	55.094		
5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	-	55.094	-	-	-	55.094		
01	RM	-	55.094	-	-	-	55.094		
JUMLAH		-	55.094	-	-	-	55.094		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (408728) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

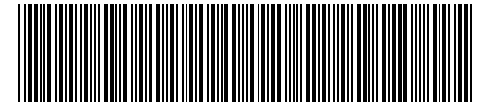
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408728	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	7.684	27.170	6.320	1.380	8.880	2.280	1.380	0	0	0	55.094
		52 BELANJA BARANG	0	0	7.684	27.170	6.320	1.380	8.880	2.280	1.380	0	0	0	55.094
	013.11.04.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	0	0	7.684	27.170	6.320	1.380	8.880	2.280	1.380	0	0	0	55.094
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	7.684	27.170	6.320	1.380	8.880	2.280	1.380	0	0	0	55.094

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020
IV A. B L O K I R**



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408728] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M
NIP 196611191986031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.11.2.408728/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:9802-6196-9301-0434

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [408728] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M
NIP 196611191986031001